

ISSN 2828-285x



# POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN  
BIOSAINS TROPIKA**  
Vol. 6 No. 4 Tahun 2024

Percepatan Penurunan Stunting Melalui  
Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi  
Aman di Kalimantan Barat

Penulis

Muhamad Dodi Bokasa<sup>1</sup>, Nindyantoro<sup>1</sup>, Danang Pramudita<sup>1</sup>, Siti Alfiah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Departemen Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

<sup>2</sup> Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden

# Percepatan Penurunan Stunting Melalui Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi Aman di Kalimantan Barat

## Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) Peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi aman merupakan langkah prioritas sebagai upaya percepatan penurunan *stunting* di Kalimantan Barat.
- 2) Tujuan dari *policy brief* ini adalah untuk memberikan informasi dan rekomendasi strategis untuk menurunkan angka prevalensi *stunting* dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- 3) Kolaborasi lintas sektor berbasis model pentahelix sangat diperlukan untuk mengimplementasikan solusi yang efektif terhadap permasalahan *stunting* dengan melibatkan *multi-stakeholder*.
- 4) Aktualisasi pojok literasi kesehatan akan memperkuat pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesadaran dalam mencegah *stunting*.

## Ringkasan

*Stunting* merupakan kondisi yang ditandai oleh terhambatnya pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama selama seribu hari pertama kehidupannya. Kondisi tersebut berdampak negatif terhadap tinggi badan anak dan berkorelasi dengan penurunan kemampuan kognitif serta produktivitas di masa depan. Pada tahun 2023, prevalensi *stunting* di Kalimantan Barat tercatat sebesar 24,5%, angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya mencapai 21,5%. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* untuk mengurangi angka *stunting* melalui intervensi yang berkaitan dengan akses air bersih dan sanitasi aman. Namun, tantangan signifikan masih dihadapi seperti rendahnya akses terhadap air bersih, tingkat kepemilikan jamban oleh rumah tangga masih sangat minim, serta kurangnya *awareness* masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Program-program seperti WASH, SAHABAT, FINWASH4UC, dan PRESISI telah diterapkan, tetapi efektivitasnya terhalang oleh masalah infrastruktur dan rendahnya partisipasi masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi, seperti kolaborasi pentahelix, pelaksanaan program *Training of Trainer (ToT)* berbasis *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, serta pendekatan edukasi kesehatan yang berlandaskan *Health Belief Model (HBM)* untuk memastikan keberhasilan dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting* di Kalimantan Barat.

**Kata kunci:** Stunting, Kalimantan Barat, air bersih, sanitasi aman

## Pendahuluan

Stunting adalah kondisi yang ditandai oleh terhambatnya pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama selama seribu hari pertama kehidupan. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki tinggi badan di bawah standar usianya, yang seringkali diikuti oleh penurunan kemampuan kognitif dan produktivitas di masa depan (Utami et al., 2024). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mencerminkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah, yang pada akhirnya memengaruhi daya saing ekonomi secara nasional.

Menyadari dampak luas dari stunting, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 telah menetapkan kebijakan percepatan penurunan stunting yang berfokus pada intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Salah satu elemen kunci dalam kebijakan ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar, seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi aman, yang memiliki peran penting dalam mencegah infeksi dan malnutrisi yang menjadi penyebab utama stunting. Di Kalimantan Barat, prevalensi stunting yang tercatat sebesar 24,5% pada tahun 2023 menunjukkan masih adanya kesenjangan signifikan dibandingkan rata-rata nasional. Tantangan utama di wilayah ini meliputi keterbatasan infrastruktur, geografis yang sulit dijangkau, dan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

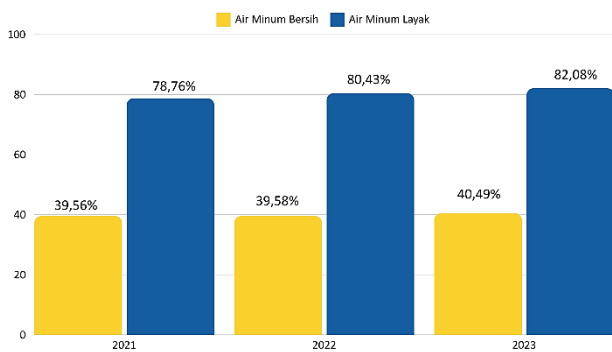
Berbagai kebijakan telah diluncurkan untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 146 Tahun 2020 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Selain itu, program kolaboratif seperti WASH (*Water, Sanitation, Hygiene*), SAHABAT, FINWASH4UC, dan PRESISI bertujuan meningkatkan akses air bersih dan sanitasi aman. Namun, efektivitas program ini masih terhambat oleh kurangnya koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih strategis diperlukan untuk memastikan kebijakan tersebut dapat

menghasilkan dampak nyata dalam menurunkan prevalensi stunting.

Pendekatan ini mencakup kolaborasi *multi-stakeholder* berbasis model *pentahelix*, pelaksanaan Program *Training of Trainer* (ToT) dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), serta edukasi kesehatan berbasis *Health Belief Model* (HBM). Strategi ini tidak hanya dirancang untuk mengatasi kendala teknis dan sosial, tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sehingga mampu berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penurunan stunting. Dengan demikian, kebijakan dan intervensi yang diterapkan diharapkan dapat secara signifikan mengurangi angka stunting di Kalimantan Barat, sekaligus menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan tantangan serupa.

## Tantangan Distribusi dan Kualitas Air Bersih

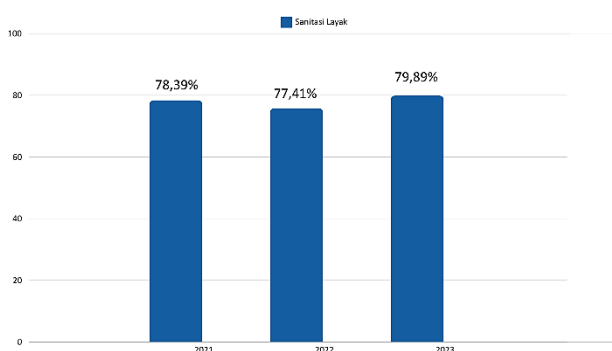
Akses rumah tangga terhadap air minum bersih dan layak di Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan meskipun terdapat peningkatan bertahap dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan Gambar 1, persentase rumah tangga dengan akses ke air minum bersih meningkat dari 39,56% pada 2021 menjadi 40,49% pada 2023. Sementara itu, persentase rumah tangga yang memiliki akses ke air minum layak meningkat dari 78,76% pada 2021 menjadi 82,08% pada 2023 (BPS Provinsi Kalimantan Barat 2024). Walaupun angka ini menunjukkan perbaikan, isu distribusi dan keterbatasan infrastruktur air bersih di kawasan pedesaan dan terpencil tetap menghambat pencapaian target akses universal. Keterbatasan akses ini, menjadi tantangan utama dalam mengurangi angka *stunting*. Perbaikan akses air minum bersih membutuhkan pendekatan holistik dan sinergi antar *multi-stakeholder*.



**Gambar 1** Persentase air minum bersih dan layak  
Sumber: diolah dari BPS Prov. Kalbar (2024)

## Sanitasi Aman dan Tantangan Perubahan Perilaku

Ketersediaan sanitasi aman di Kalimantan Barat meningkat secara perlahan dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses naik dari 78,39% pada 2021 menjadi 79,89% pada 2023 (Gambar 2). Meski terdapat peningkatan, namun masih ada kesenjangan akses sanitasi aman di daerah tertentu yang membutuhkan perhatian khusus. Tantangan utama bukan hanya pada infrastruktur, tetapi juga kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta untuk edukasi dan peningkatan fasilitas sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas sanitasi aman yang tersedia secara efektif.



**Gambar 2** Persentase sanitasi layak  
Sumber: diolah dari BPS Prov. Kalbar (2024)

## Rekomendasi

Berbagai program kolaboratif telah diinisiasi untuk percepatan penurunan *stunting* di Kalimantan Barat yang melibatkan *multi-*

*stakeholder*. Meskipun demikian, prevalensi *stunting* di Kalimantan Barat masih mencapai 24,5% pada 2023, melebihi rata-rata nasional 21,5% (Kementerian Kesehatan 2024). Berdasarkan Laporan Pemantauan, Pengukuran, dan Intervensi di Kalimantan Barat yang disusun oleh Asisten Deputi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia, Sekretariat Wakil Presiden (2024), mengkonfirmasi beberapa posyandu, seperti Tunas Fajar dan Melati Putih di Kabupaten Kubu Raya masih mengalami keterbatasan pada pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman. Posyandu Cemara dan Buah Jubata di Kabupaten Landak mengungkapkan kendala mengenai kualitas air tanah dan air permukaan belum layak konsumsi. Cakupan desa yang menerapkan program *Stop BAB Sembarangan* (SBS) baru 40%. Sementara itu, Puskesmas Anggrek dan Cempaka Putih di Kabupaten Mempawah melaporkan penggunaan jamban sehat masih belum memenuhi standar. Berdasarkan permasalahan tersebut strategi yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah, yaitu:

### 1. Kolaborasi Pentahelix untuk Meningkatkan Akses Air Bersih dan Sanitasi Aman

Pemenuhan kebutuhan akses air bersih dan sanitasi aman merupakan langkah strategis dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah berperan penting dalam mengkoordinasikan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah pusat, akademisi, masyarakat, serta sektor swasta. Pemerintah daerah dapat memulai kolaborasi dengan memetakan lokasi prioritas berdasarkan prevalensi *stunting* dan kebutuhan infrastruktur dasar. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) mengenai percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

Lebih lanjut, pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan sektor swasta yang sedang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemerintah daerah dapat mendorong pembangunan infrastruktur sanitasi aman dan penyediaan akses air bersih. Program ini

dapat diperkuat dengan pembentukan pojok literasi kesehatan di setiap rukun warga (RW) yang berfungsi sebagai tempat edukasi kepada masyarakat dan *focus group discussion* (FGD) untuk meningkatkan *awareness* publik. Sehubungan dengan program ini, pemerintah pusat berperan dalam mendukung kebijakan melalui pendanaan dan penduan teknis, sementara Dinas Kesehatan setempat dapat memastikan pemantauan secara masif terhadap aktualisasi program.

## 2. Program *Training of Trainer* (ToT) dengan Pendekatan *Participatory Rural Appraisal*

Pemerintah daerah melalui dinas kesehatan dapat memimpin pelaksanaan Program *Training of Trainer* (ToT) berbasis pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Kalimantan Barat. Dinas kesehatan berperan sebagai pengelola utama dalam merancang modul pembelajaran, mengoordinasikan tenaga kesehatan sebagai fasilitator, serta memastikan keterlibatan kader posyandu dan kader pojok literasi kesehatan di setiap rukun warga (RW). Program ToT diawali dengan melakukan pelatihan secara berkala kepada para kader. Pada kader sebagai co-fasilitator akan mendampingi masyarakat, khususnya calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya akses air bersih dan sanitasi aman. Skema ini dirancang untuk meningkatkan *skill* kader sebagai sumber daya manusia yang kompeten dalam mendampingi masyarakat (Bokasa *et al.* 2024).

## 3. Edukasi Kesehatan Berbasis *Health Belief Model* (HBM)

Pendidikan berbasis *Health Belief Model* (HBM) dapat diaktualisasikan melalui kader yang dilatih untuk mengedukasi masyarakat di pojok literasi kesehatan. Kader akan menggunakan pendekatan HBM untuk meningkatkan *awareness* tentang *stunting* kepada target prioritas. Program edukasi akan mencakup sesi peningkatan pengetahuan mengenai risiko, dampak *stunting*, serta manfaat dari intervensi dini. Sesi-sesi ini berlangsung selama 60 menit dan menggunakan metode interaktif seperti ceramah, *focus group*

*discussion* (FGD), sesi tanya jawab, dan demonstrasi praktis melalui media poster. Metode tersebut dapat meningkatkan *self-efficacy* peserta sehingga mereka lebih percaya diri dalam mengambil langkah pencegahan (Rodi *et al.* 2024). Penelitian tersebut sejalan dengan temuan Agide *et al.* (2024), yang mengkonfirmasi bahwa intervensi berbasis komunitas dengan model HBM terbukti efektif dan efisien dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

## Kesimpulan

Program yang diimplementasikan untuk menurunkan prevalensi *stunting* di Kalimantan Barat menunjukkan hasil yang belum optimal. Berbagai program telah diaktualisasikan, tetapi tantangan seperti terbatasnya pemenuhan akses air bersih, fasilitas sanitasi aman yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Program yang ada belum mampu menjangkau kelompok sasaran dengan efektif, seperti calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui. Berdasarkan kondisi tersebut, pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif seperti kolaborasi pentahelix antar *multi-stakeholder*, program *Training of Trainer* (ToT) dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), dan pendidikan berbasis *Health Belief Model* (HBM) sangatlah diperlukan. Melalui strategi yang lebih terarah, diharapkan penurunan prevalensi *stunting* di Kalimantan Barat dapat dicapai secara optimal.

## Daftar Pustaka

- Agide FD, Garmaroudi G, Sadeghi R, Shakibazadeh E, Yaseri M, Koricha ZB. 2024. A health belief model-based community health education on mammography screening among reproductive-aged women in Ethiopia: A randomized controlled trial. *Front. Public Health.* 12: 1-14. doi:10.3389/fpubh.2024.1377173.
- [BPS Provinsi Kalimantan Barat] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2024.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak menurut kabupaten/kota. URL: <https://kalbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzY4IzI=/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-layanan-sanitasi-layak-menurut-kabupaten-kota--persen-.html>. Diakses 27 Oktober 2024.

[BPS Provinsi Kalimantan Barat] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2024. Persentase rumah tangga yang memiliki sumber air minum bersih dan air minum layak menurut kabupaten/kota. URL: <https://kalbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzcxIzI=/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-sumber-air-minum-bersih-dan-air-minum-layak-menurut-kabupaten-kota--persen-.html>. Diakses 27 Oktober 2024.

Bokasa MD, Salsabila S, Abdurrahman MR, Anggi S, Ismail A. 2024. Implementasi Program Pelita berbasis training of trainer untuk pengembangan desa cerdas pertanian di Desa Benteng. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*. 10(3):315-323. doi:10.29244/agrokreatif.10.3.315-323.

[Kemenkes] Kementerian Kesehatan. 2024. Laporan Tematik Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023. Jakarta (ID): Kemenkes.

[Pergub] Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 146 Tahun 2020 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 2020.

[Perpres] Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 2021.

Rodi NH, Nasirzadeh M, Mehdipour A, Asadpour M. 2024. The effect of health belief model-based educational intervention on colorectal cancer screening among men aged 50-70 years. *Journal of Education and Community Health*. 11(2):75-82. doi:10.34172/jech.2162.

[Setwapres] Sekretariat Wakil Presiden. 2024. Laporan Pemantauan Intervensi Serentak Provinsi Kalimantan Barat. Jakarta (ID): Setwapres.

Utami W, Rashid NA, Sansuwito T. 2024. The effectiveness of educational puzzle on the cognitive ability of stunting children at the age of preschool: Literature review. *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*. 20(7):195-199.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

## Author Profile



**Muhamad Dodi Bokasa**, Mahasiswa Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University. (**Corresponding Author**)  
Email: [muhamaddodi@apps.ipb.ac.id](mailto:muhamaddodi@apps.ipb.ac.id)



**Nindyantoro**, Dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University. Beliau merupakan tergabung dalam *Center for Regional Systems Analysis Planning and Development* (CRSAPD).



**Danang Pramudita**, Dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University.



**Siti Alfiah**, Analis Kebijakan Madya, Asisten Deputi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden.



**Telepon**  
+62 813 8875 4005



**Email**  
[dkasra@apps.ipb.ac.id](mailto:dkasra@apps.ipb.ac.id)



**Alamat**  
Gedung LSI Lt. 1  
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga  
Bogor - Indonesia 16680